

Pengenalan Fungsi Pajak bagi Pembangunan Negara dan Simulasi Pendaftaran NPWP bagi Pemilih Pemula

An Introduction to the Role of Taxes in National Development and a Simulation of NPWP Registration for First-Time Voters.

Lembah Dewi Andini*¹, Brigita Puji Lestari²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti, Bekasi, Indonesia

*Email corresponding: lembahadewiandini@stietribhakti.ac.id

ABSTRAK

Pemilih pemula merupakan kelompok demografis strategis yang sering mengalami miskonsepsi terkait kewajiban perpajakan, khususnya semenjak diberlakukannya kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai fungsi pajak bagi pembangunan negara sekaligus mendampingi pemilih pemula dalam simulasi pendaftaran NPWP secara digital di Kecamatan Bekasi Selatan. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Community-Based Participatory Research* (CBPR) yang melibatkan 100 orang peserta yang terdiri dari siswa sekolah menengah akhir dan mahasiswa tingkat pertama. Tahapan kegiatan meliputi sosialisasi teoretis, *Focus Group Discussion* (FGD), dan simulasi pendaftaran mandiri melalui portal e-Registration Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan literasi yang signifikan dengan skor *N-Gain* sebesar 0,72 (kategori tinggi), di mana nilai rata-rata peserta meningkat dari 45,50 (*pre-test*) menjadi 85,20 (*post-test*). Selain itu, lebih dari 90% peserta menyatakan kegiatan ini relevan dalam mereduksi kecemasan administratif mereka dan meningkatkan kesiapan menyongsong dunia kerja. Kesimpulannya, kombinasi metode edukasi dan pendampingan vokasional digital terbukti efektif dalam mentransformasi paradigma generasi muda menuju kepatuhan perpajakan yang lebih baik.

Kata kunci: Pemilih Pemula, NIK-NPWP, Literasi Pajak, Simulasi Digital, Bekasi Selatan.

ABSTRACT

First-time voters represent a strategic demographic group that frequently experiences misconceptions regarding tax obligations, particularly since the implementation of the policy integrating the National Identity Number (NIK) into the Taxpayer Identification Number (NPWP). This Community Service (PKM) program aims to educate first-time voters on the function of taxes for national development and assist them in a digital simulation of NPWP registration in South Bekasi District. The implementation method utilized a Community-Based Participatory Research (CBPR) approach, involving 100 participants comprising high school seniors and first-year university students. The activities included theoretical socialization, Focus Group Discussions (FGD), and an independent registration simulation via the Directorate General of Taxes (DJP) e-Registration portal. The evaluation results demonstrated a significant increase in literacy, with an N-Gain score of 0.72 (high category), where the participants' average score increased from 45.50 (pre-test) to 85.20 (post-test). Furthermore, over 90% of the participants stated that this program was highly relevant in reducing their administrative anxiety and improving their readiness to enter the workforce. In conclusion, the combination of educational methods and digital vocational mentoring proved effective in transforming the younger generation's paradigm toward better tax compliance.

Keywords: First-Time Voters, NIK-NPWP, Tax Literacy, Digital Simulation, South Bekasi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal paling vital sekaligus tulang punggung pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Secara esensial, pajak berfungsi sebagai sumber dana utama bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan fisik maupun nonfisik, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberian subsidi bagi masyarakat kelas bawah (Resmi, 2023). Ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak sangatlah tinggi, yang secara konsisten mencapai lebih dari tujuh puluh persen dari total pendapatan negara setiap tahunnya. Oleh sebab itu, keberlangsungan pembangunan nasional yang mandiri sangat bergantung pada optimalisasi realisasi penerimaan pajak secara berkesinambungan.

Meskipun memegang peranan yang sangat krusial, realitas di lapangan menunjukkan bahwa rasio pajak (*tax ratio*) dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum mencapai titik optimal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela masih menjadi tantangan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan (Pebriansyah et al., 2024). Rendahnya tingkat kepatuhan ini sering kali berakar pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak secara riil, serta adanya persepsi negatif yang menganggap pajak sebagai beban finansial semata, bukan sebagai bentuk kontribusi dan gotong royong warga negara.

Kondisi perekonomian nasional pascapandemi yang masih dihantui oleh ketidakpastian ekonomi global pada kurun waktu 2025 hingga 2026 menuntut kemandirian finansial yang lebih kuat dari dalam negeri. Upaya pemulihan dan stabilitas ekonomi membutuhkan ketersediaan likuiditas negara yang memadai, yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor utang luar negeri untuk membiayai operasional kenegaraan (Suripto et al., 2024). Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat melalui pembayaran pajak yang taat menjadi pilar utama penyangga ketahanan ekonomi negara guna memastikan roda pemerintahan dan layanan publik tetap berjalan secara maksimal.

Dalam skala regional, kondisi makroekonomi tersebut beresonansi kuat di wilayah urban seperti Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pemukiman yang sangat dinamis di Provinsi Jawa Barat. Tingkat perputaran ekonomi yang tinggi di kawasan Bekasi Selatan mengindikasikan adanya potensi penerimaan perpajakan yang sangat besar untuk mendukung kemajuan daerah. Namun, kemajuan ekonomi yang masif di kawasan ini tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya literasi dan kepatuhan administratif warganya terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Di tengah dinamika pembangunan kawasan Bekasi Selatan tersebut, terdapat satu kelompok demografis strategis yang sering terabaikan dalam diskursus perpajakan, yaitu kelompok pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan generasi muda yang baru pertama kali memiliki hak pilih dalam proses demokrasi, umumnya berusia 17 hingga 21 tahun, yang sedang berada pada fase transisi dari jenjang pendidikan menengah menuju dunia kampus atau dunia kerja (Sholahuddin et al., 2022). Kelompok ini bukan sekadar target politik dalam pemilihan umum, melainkan representasi dari generasi penerus estafet kepemimpinan dan roda perekonomian bangsa di masa depan.

Karakteristik pemilih pemula di era modern saat ini sangat lekat dengan penggunaan teknologi informasi dan literasi digital yang mumpuni. Mereka terbukti sangat reaktif terhadap isu-isu sosial dan politik yang berkembang cepat di media sosial, termasuk terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah (Indriastuti & Permatasari, 2022). Sayangnya, tingginya penetrasi teknologi digital di kalangan generasi milenial dan Gen Z ini tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan pemahaman mendalam mengenai kewajiban mendasar sebagai warga negara, khususnya dalam memahami sistem administrasi perpajakan.

Fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa literasi perpajakan di kalangan pemilih pemula masih tergolong sangat memprihatinkan. Mayoritas kaum muda belum menyadari bahwa kontribusi pajak di masa depan sangat menentukan arah keberhasilan pembangunan nasional, dan banyak dari mereka yang merasa persoalan pajak adalah murni domain orang dewasa, pegawai, atau entitas bisnis besar semata (Ermadiani et al., 2023). Ketidakhadiran pemahaman dasar mengenai fungsi pajak sejak dini dapat berisiko fatal dalam melahirkan generasi angkatan kerja baru yang apatis dan cenderung menghindari kewajiban pajaknya.

Tantangan literasi ini menjadi semakin kompleks dengan adanya pembaruan regulasi fundamental di bidang perpajakan yang menuntut adaptasi publik secara masif. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu poin perubahan yang paling transformatif

dalam undang-undang tersebut adalah integrasi sistem data kependudukan dengan sistem perpajakan nasional, yang dirancang untuk memperkuat fondasi *single identity number* (identitas tunggal) bagi setiap warga negara di Indonesia.

Secara lebih teknis, implementasi dari UU HPP tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 yang menetapkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara resmi difungsikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kebijakan administratif ini memiliki dampak langsung bagi para pemilih pemula yang baru saja memenuhi syarat mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada usia 17 tahun. Artinya, dari kacamata perundang-undangan, sistem perpajakan kini hadir jauh lebih dekat dan terikat erat dengan generasi muda dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Sayangnya, ketidaktahuan generasi muda terhadap substansi hukum dan regulasi integrasi NIK menjadi NPWP ini memunculkan berbagai miskonsepsi yang merugikan (Pundissing et al., 2023). Salah satu fenomena misinformasi yang marak beredar dan memicu keresahan publik adalah anggapan bahwa setiap individu yang telah memiliki KTP akan serta-merta dikenakan potongan pajak atau dipaksa wajib membayar pajak oleh negara. Padahal, kewajiban menyetorkan pajak penghasilan hanya berlaku mutlak apabila warga negara tersebut telah memiliki sumber pendapatan tetap yang nominalnya berada di atas ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Fenomena ketakutan administratif akibat misinformasi tersebut sangat terasa dampaknya di kalangan pemilih pemula di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan. Banyak siswa sekolah menengah akhir maupun mahasiswa baru yang merasa enggan, bingung, bahkan cemas mengenai bagaimana melakukan pendaftaran, validasi, dan pematangan NIK mereka sebagai NPWP pada portal perpajakan nasional yang berlaku saat ini. Tanpa adanya intervensi informasi yang jernih dan terstruktur, keresahan ini justru dapat memicu resistensi psikologis terhadap institusi kenegaraan sejak usia belia.

Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, pendekatan edukasi yang hanya mengandalkan metode teoretis pengenalan pajak dalam ruangan kelas terbukti tidak cukup komprehensif. Pemilih pemula mutlak membutuhkan pendekatan pendampingan yang bersifat prosedural dan taktil agar mereka benar-benar memahami mekanisme birokrasi perpajakan yang kini sudah terdigitalisasi. Oleh karena itu, pemahaman teoretis tentang fungsi pajak bagi pembangunan negara harus disinergikan dengan pelaksanaan simulasi praktis mengenai tata cara pendaftaran dan validasi NPWP melalui sistem *online* milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab moral dan akademik, institusi perguruan tinggi memiliki peranan sentral melalui pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan pengabdian menjadi instrumen esensial bagi para akademisi untuk turun berinteraksi langsung di tengah masyarakat, memecah kebuntuan arus informasi regulasi, serta memberikan pendampingan yang berharga kepada kelompok yang rentan terpapar misinformasi seperti para pemilih pemula di Kecamatan Bekasi Selatan (Susilo, 2025).

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan ini dirancang secara terpadu melalui metode sosialisasi interaktif dua arah dan pendampingan simulasi teknologi. Melalui forum ini, para pemilih pemula tidak hanya diberikan wawasan komprehensif mengenai filosofi pajak dalam menopang perekonomian, namun juga dipandu langsung untuk melakukan simulasi registrasi secara aman menggunakan perangkat mereka sendiri. Pendekatan dwifungsi ini diharapkan dapat membongkar stigma negatif terhadap pajak, sekaligus membekali generasi muda dengan keterampilan kewarganegaraan digital yang tepat sasaran.

Berdasarkan uraian komprehensif terkait fenomena sosiologis, kondisi perekonomian makro daerah, dan transisi regulasi di atas, artikel ini disusun guna mendeskripsikan secara rinci keterlaksanaan program pengabdian dengan judul "Pengenalan Fungsi Pajak bagi Pembangunan Negara dan Simulasi Pendaftaran NPWP bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Bekasi Selatan". Tulisan ini pada akhirnya bertujuan untuk memetakan efektivitas penyuluhan dan simulasi yang diterapkan, serta menganalisis peningkatan literasi hukum perpajakan yang dicapai oleh para peserta sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian ini diselenggarakan.

BAHAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode *Community-Based Participatory Research* (CBPR) yang berfokus pada pelibatan partisipasi aktif

antara tim akademisi dan elemen masyarakat (Hidayat & Mulyana, 2024). Metode ini dipilih karena sangat relevan untuk mengintervensi tingkat pemahaman kelompok sasaran melalui pendekatan edukasi interaktif dan simulasi praktis secara langsung. Tujuan utama dari penggunaan metode CBPR ini tidak sekadar menyampaikan informasi regulasi secara searah, tetapi memastikan bahwa setiap partisipan mampu mengaplikasikan pengetahuan administratif tersebut secara mandiri di dunia nyata. Melalui pendekatan partisipatif ini, diharapkan dapat terjadi perubahan paradigma dan pembentukan perilaku sadar pajak pada generasi muda yang berkesinambungan.

Kegiatan pengabdian ini difokuskan di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Rangkaian kegiatan edukasi dan simulasi ini dilaksanakan selama kurun waktu dua bulan, terhitung mulai dari minggu pertama bulan Februari hingga minggu terakhir bulan Maret 2026. Pemilihan lokasi pengabdian ini didasarkan pada data demografi terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi yang mengonfirmasi tingginya rasio penduduk usia produktif dan pemilih pemula di kawasan tersebut, menjadikannya episentrum yang sangat ideal untuk penanaman literasi perpajakan dini (BPS Kota Bekasi, 2025). Selain itu, Bekasi Selatan merupakan wilayah urban dengan kualitas infrastruktur internet yang memadai, sehingga sangat mendukung kelancaran pelaksanaan simulasi pendaftaran berbasis teknologi digital.

Kelompok sasaran utama dalam program ini adalah para pemilih pemula yang berdomisili atau sedang menempuh pendidikan di lingkup Kecamatan Bekasi Selatan. Kriteria inklusi sasaran dibatasi pada remaja atau pemuda berusia 17 hingga 21 tahun yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun belum mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penentuan jumlah peserta dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang menjangring sebanyak 100 orang mitra sasaran, yang terdiri atas perwakilan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dan mahasiswa tingkat pertama (Rahmawati et al., 2024). Rekrutmen partisipan difasilitasi melalui koordinasi aktif dengan pihak Karang Taruna kecamatan dan pihak sekolah guna menjamin keterwakilan demografis yang tepat.

Mengingat kegiatan inti PKM ini sangat bergantung pada praktik pendaftaran secara digital, spesifikasi alat dan bahan memegang peranan krusial dalam menunjang keberhasilan simulasi. Kebutuhan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang disiapkan tim pengabdian harus dipastikan memenuhi spesifikasi minimum akses terhadap portal layanan perpajakan nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Alat bantu ini tidak hanya memfasilitasi penyampaian materi presentasi, namun juga memfasilitasi pendaftaran mandiri (*hands-on experience*) oleh peserta di lokasi kegiatan. Spesifikasi rinci mengenai alat dan bahan yang wajib tersedia dalam pelaksanaan pengabdian ini disajikan secara sistematis pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi Alat dan Bahan Simulasi Pendaftaran NPWP

No	Jenis Alat/Bahan	Spesifikasi Teknis yang Dibutuhkan	Fungsi dalam Kegiatan PKM
1	Proyektor & Layar	Minimal resolusi HD (1280x720), konektivitas HDMI/Wireless	Menampilkan presentasi materi dan mencontohkan alur antarmuka portal DJP
2	Smartphone / Laptop	OS Android min. v10 / iOS 14 / Windows 10, Browser terbaru	Perangkat utama bagi peserta untuk mengakses portal pendaftaran NPWP
3	Koneksi Internet	Mobile Tethering / Wi-Fi Router dengan bandwidth minimal 50 Mbps	Memastikan akses mulus dan tanpa henti (<i>lag</i>) ke server DJP Online
4	Modul Edukasi (Cetak)	Buku saku ukuran A5, cetak berwarna, 15 halaman	Panduan teoretis ringkas mengenai fungsi pajak dan UU HPP
5	Dummy Data KTP	Fotokopi KTP yang telah disamarkan watermark-nya	Sebagai acuan dokumen identitas bagi peserta saat mengisi formulir pendaftaran
6	Portal e-Registration	Akses jaringan langsung ke <i>ereg.pajak.go.id</i>	Ekosistem <i>software</i> utama untuk mengeksekusi simulasi pendaftaran

Prosedur pelaksanaan PKM ini dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yang diawali dengan tahap persiapan program. Pada fase ini, tim pengabdian melaksanakan studi pendahuluan lapangan, penyusunan materi presentasi, pencetakan modul bertajuk "Generasi Muda Sadar Pajak", serta perancangan instrumen evaluasi kegiatan berbasis *online* (Wibowo & Siregar, 2024). Selain persiapan administratif, tim juga melakukan uji coba kelayakan (*load testing*) jaringan

internet di lokasi acara untuk mengantisipasi kegagalan sistem (*server timeout*) saat peserta mengakses portal perpajakan secara serentak. Tahap ini juga mencakup konsolidasi teknis dengan aparaturnya kelurahan dan tokoh pemuda setempat guna memastikan mobilisasi peserta berjalan dengan tertib.

Tahap kedua merupakan tahap sosialisasi teoretis yang berfokus pada penanaman kesadaran akan pentingnya fungsi pajak dalam menopang perekonomian negara. Materi edukasi disampaikan melalui kombinasi metode ceramah interaktif dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang mengupas tuntas struktur APBN, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik yang dibiayai oleh pajak (Pebriansyah et al., 2024). Pada sesi ini, tim pengabdian secara khusus membedah pembaruan regulasi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Penjelasan difokuskan untuk meluruskan miskonsepsi umum yang sering membuat generasi muda merasa takut, terutama terkait kebijakan bahwa NIK berfungsi sebagai NPWP namun kewajiban membayar pajak tetap bergantung pada batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Tahap pelaksanaan PKM mencapai puncaknya pada sesi simulasi praktis pendaftaran NPWP yang merupakan inti intervensi vokasional dari kegiatan ini. Setiap peserta didampingi secara komprehensif oleh satu fasilitator untuk setiap kelompok kecil guna mempraktikkan langsung tata cara pembuatan akun dan registrasi di situs *ereg.pajak.go.id* menggunakan perangkat *smartphone* masing-masing (Suripto et al., 2024). Proses simulasi dipandu secara bertahap (*step-by-step*), meliputi proses verifikasi email, pengisian data demografis sesuai NIK, pengisian status pekerjaan untuk pemilih pemula (belum bekerja/mahasiswa), hingga proses akhir pengiriman token ke email peserta. Simulasi langsung ini dirancang untuk mendobrak dinding kecemasan birokrasi dan melatih kecakapan administrasi digital secara mandiri.

Teknik pengumpulan data untuk mengevaluasi efektivitas program pengabdian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* kuantitatif dan kualitatif guna menghasilkan luaran analisis yang valid. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan menggunakan instrumen kuesioner dengan skala Likert (1-5) yang didistribusikan melalui *Google Forms* sebelum materi diberikan (*pre-test*) dan sesaat setelah simulasi selesai dilakukan (*post-test*) (Sugiyono, 2023). Kuesioner tersebut secara ketat mengukur dua indikator utama, yakni pemahaman konseptual perpajakan dan tingkat literasi teknis pendaftaran *online*. Selain itu, data kualitatif dikumpulkan melalui lembar observasi partisipatif dan wawancara tidak terstruktur untuk memetakan dinamika emosional, kendala teknis *user interface*, serta respons antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung.

Analisis data kuantitatif dari hasil kuesioner diproses menggunakan statistik inferensial, secara spesifik menggunakan uji beda rata-rata berpasangan (*Paired Sample T-Test*) untuk melihat signifikansi peningkatan pemahaman sebelum dan sesudah intervensi. Sebelum dilakukan uji hipotesis, data terlebih dahulu dipastikan memenuhi syarat asumsi normalitas melalui uji *Kolmogorov-Smirnov* (Lestari et al., 2023). Untuk memperkuat tingkat pengukuran efektivitas modul simulasi secara empiris, tim peneliti juga mengkalkulasi skor *Normalized Gain* (N-Gain Score). Hasil perhitungan N-Gain ini digunakan untuk mengklasifikasikan keefektifan program PKM ke dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah, sehingga memberikan gambaran nyata atas keberhasilan metode pendampingan yang diaplikasikan.

Tahapan paling akhir dari metodologi PKM ini adalah penyajian data (*data visualization*) yang dikonstruksi secara rapi untuk mempermudah interpretasi pembaca dan pemangku kepentingan. Hasil analisis demografi kelompok sasaran, skor evaluasi, dan signifikansi statistik disajikan menggunakan visualisasi berupa tabel distribusi frekuensi, diagram batang (*bar chart*) untuk membandingkan rata-rata nilai, serta diagram lingkaran (*pie chart*) untuk memetakan kategori N-Gain (Creswell & Creswell, 2023). Data visual tersebut tidak dibiarkan berdiri sendiri, melainkan diinterpretasikan melalui narasi deskriptif analitis yang menghubungkan hasil temuan dengan urgensi pendidikan pemilih pemula. Penyajian akhir ini diharapkan mampu menjadi fondasi penyusunan rekomendasi yang kredibel bagi institusi Direktorat Jenderal Pajak maupun instansi pendidikan terkait di wilayah Bekasi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan fokus pengenalan fungsi pajak dan simulasi pendaftaran NPWP telah dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan

perencanaan awal. Kegiatan ini dipusatkan di balai pertemuan warga dan aula sekolah mitra di lingkungan Kecamatan Bekasi Selatan, yang diikuti oleh partisipan secara antusias. Tahapan kegiatan yang terdiri dari tahap registrasi, *pre-test*, pemaparan materi teoretis, simulasi praktis, hingga *post-test* dan pengisian kuesioner umpan balik dapat diselesaikan secara runut dalam rentang waktu yang dialokasikan. Kesuksesan penyelenggaraan ini tidak terlepas dari koordinasi yang solid antara tim akademisi, aparaturnya setempat, dan tokoh pemuda Karang Taruna yang memfasilitasi kelancaran acara.

Karakteristik subjek pengabdian atau kelompok sasaran yang hadir dalam program ini memiliki profil demografis yang cukup spesifik dan homogen, mengingat fokus utama PKM adalah kelompok pemilih pemula. Total peserta yang berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir kegiatan berjumlah 100 orang. Berdasarkan data registrasi, profil demografis peserta dikategorikan berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin yang secara rinci disajikan pada Tabel 2. Data tersebut memvalidasi bahwa mayoritas peserta berada pada titik transisi usia produktif yang memang menjadi target strategis intervensi edukasi kewarganegaraan.

Tabel 2. Karakteristik Demografi Peserta (n=100)

Indikator Demografi	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Rentang Usia	17 - 18 Tahun	68	68%
	19 - 21 Tahun	32	32%
Jenis Kelamin	Laki-laki	46	46%
	Perempuan	54	54%

Selain profil usia dan jenis kelamin, karakteristik pendidikan peserta juga menjadi variabel penting dalam memetakan kapasitas kognitif awal sasaran. Kelompok peserta didominasi oleh siswa sekolah menengah akhir (SMA/SMK sederajat) yang duduk di bangku kelas XII sebanyak 68 orang, sedangkan 32 orang sisanya merupakan mahasiswa tingkat pertama (semester 1 hingga semester 3) dari berbagai perguruan tinggi di sekitar wilayah Bekasi. Latar belakang pendidikan ini memberikan gambaran bahwa secara akademis, peserta telah memiliki kemampuan dasar untuk mencerna informasi regulasi publik, meskipun masih sangat minim mendapatkan paparan mata pelajaran spesifik terkait administrasi perpajakan.

Sebelum materi sosialisasi diberikan, tim pengabdian melaksanakan evaluasi awal (*pre-test*) guna mengukur *baseline* pengetahuan sasaran terkait esensi fungsi pajak dan kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa tingkat literasi perpajakan peserta pada mulanya masih tergolong rendah, dengan perolehan nilai rata-rata keseluruhan hanya mencapai 45,50 dari skala 100. Hal ini mengkonfirmasi temuan awal tim bahwa mayoritas pemilih pemula di kawasan urban seperti Bekasi Selatan sekalipun, masih belum memahami arah kontribusi pajak dan terjebak pada miskonsepsi administratif yang beredar luas di media sosial.

Menindaklanjuti observasi awal tersebut, pelaksanaan sosialisasi teoretis dieksekusi menggunakan pendekatan komunikatif dan pemilihan diksi yang mudah dicerna oleh generasi muda. Tim pengabdian memaparkan secara komprehensif peran pajak dalam menyokong postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur, layanan kesehatan, dan subsidi pendidikan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Selama sesi ini, peserta menunjukkan tingkat atensi yang sangat tinggi, dibuktikan dengan ramainya pertanyaan kritis yang muncul saat sesi diskusi terbuka mengenai keadilan pemungutan pajak.

Memasuki sesi inti kegiatan vokasional, tim pengabdian memandu pelaksanaan simulasi pendaftaran NPWP secara digital melalui situs e-Registration milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Simulasi ini dirancang menggunakan metode pendampingan terstruktur (*step-by-step guidance*) di mana setiap 10 peserta secara intensif didampingi oleh satu fasilitator lapangan. Peserta diminta mengakses peramban pada *smartphone* masing-masing, membuka portal ereg.pajak.go.id, dan mempraktikkan tata cara pengisian formulir registrasi menggunakan data sampel yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga suasana pelatihan menjadi sangat dinamis dan interaktif.

Guna mengukur tingkat efektivitas intervensi dan daya serap materi, evaluasi akhir (*post-test*) dilaksanakan secara serentak sesaat setelah sesi simulasi berakhir. Hasilnya memperlihatkan

lonjakan tingkat pemahaman yang sangat signifikan, dengan nilai rata-rata *post-test* menembus angka 85,20. Perbandingan perolehan nilai rata-rata sebelum dan sesudah kegiatan, beserta hasil uji statistik signifikansi pemahaman, disajikan secara sistematis pada Tabel 3. Peningkatan skor evaluasi ini merepresentasikan capaian positif dari metode sosialisasi dan simulasi dalam mendongkrak kapasitas kognitif peserta.

Tabel 3. Perbandingan Nilai Pre-Test dan Post-Test Peserta

Aspek Penilaian	Rata-Rata Nilai (Skala 100)	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	N-Gain Score	Kriteria Efektivitas
<i>Pre-Test</i>	45,50	25	65	-	-
<i>Post-Test</i>	85,20	70	100	0,72	Tinggi

Selain melakukan pengukuran aspek pengetahuan hukum, tim pengabdian juga menghimpun data umpan balik (*feedback*) dari seluruh partisipan sebagai sarana untuk mengevaluasi kepuasan dan relevansi pelaksanaan program PKM. Kuesioner umpan balik yang menggunakan skala pengukuran Likert ini menunjukkan respons komunal yang sangat memuaskan. Mayoritas mutlak dari kelompok peserta menyatakan bahwa materi perpajakan ini sangat relevan dengan persiapan mereka memasuki dunia kerja, serta mengapresiasi metode simulasi yang dianggap jauh dari kesan membosankan. Rincian persentase umpan balik dari peserta dapat diamati secara jelas pada Tabel 4.

Tabel 4. Umpan Balik (Feedback) dan Tingkat Kepuasan Peserta PKM

Indikator Umpan Balik	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju
Pemaparan materi mudah dipahami	78%	20%	2%	0%
Simulasi pendaftaran <i>online</i> sangat membantu	85%	15%	0%	0%
Kegiatan ini meredakan kecemasan terkait pajak	75%	22%	3%	0%
Relevansi kegiatan dengan kebutuhan masa depan	90%	10%	0%	0%

Lonjakan pemahaman yang tecermin secara kuantitatif dari perbedaan signifikan antara skor *pre-test* dan *post-test* membuktikan bahwa ketidaktahuan pemilih pemula di Bekasi Selatan terhadap fungsi perpajakan bukanlah suatu bentuk apatisisme yang disengaja. Ketidaktahuan ini murni diakibatkan oleh minimnya akses ruang edukasi hukum kenegaraan yang dikemas sesuai dengan gaya kognitif mereka. Argumentasi ini sangat selaras dengan temuan sosiologis bahwa generasi muda pada dasarnya memiliki keingintahuan yang amat besar terhadap kebijakan publik apabila hal tersebut dikomunikasikan melalui medium yang relevan dengan realitas keseharian mereka (Pratama & Fitriani, 2023). Ketidakhadiran materi administrasi perpajakan yang praktikal pada kurikulum sekolah menengah menjadi salah satu akar penyebab rendahnya literasi fiskal pada kelompok usia pra-kerja ini.

Pemecahan miskonsepsi mengenai regulasi integrasi NIK menjadi NPWP menjadi salah satu titik keberhasilan paling vital dalam rangkaian PKM ini. Pada awal pertemuan, sebagian besar peserta terang-terangan berasumsi bahwa kepemilikan KTP otomatis akan "memaksa" mereka untuk menyetorkan uang pajak kepada negara meskipun belum memiliki pekerjaan, sebuah narasi keliru yang banyak beredar di dunia maya. Melalui penjelasan yang gamblang mengenai konsep dan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tim pengabdian sukses mereduksi kecemasan psikologis tersebut. Tumbuhnya pemahaman yang benar terkait batas pendapatan minimal ini berhasil menanamkan pandangan baru bahwa arsitektur sistem perpajakan di Indonesia mengedepankan asas proporsionalitas dan keadilan.

Jika hasil intervensi ini dikomparasikan dengan temuan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti lain pada ranah yang sama, terdapat konsistensi yang menguatkan hipotesis efektivitas edukasi pajak secara dini. Sebuah studi PKM oleh Nugroho et al. (2024) yang dilakukan di wilayah aglomerasi perkotaan lain juga menemukan bahwa sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mampu mendongkrak *tax awareness* hingga 80% pada sasaran kelompok mahasiswa jenjang akhir. Namun, nilai tambah strategis dari pelaksanaan PKM di Bekasi Selatan ini terletak pada demografi sarasannya yang menyentuh level usia transisi paling awal (17-18 tahun), sehingga langkah mitigasi atas potensi penghindaran pajak dapat diputus dari hulunya.

Lebih lanjut, efektivitas capaian PKM ini sangat dipengaruhi oleh desain integrasi antara penyampaian materi doktrinal dan pelaksanaan simulasi taktikal. Pendekatan edukasi pajak yang secara konservatif hanya mengandalkan metode ceramah (*chalk and talk*) terbukti kurang berdampak kuat dalam membangun retensi pengetahuan pada Generasi Z, yang secara alamiah terbiasa dengan rangsangan visual dan interaktivitas digital (Cahyani & Wijaya, 2023). Oleh sebab itu, fasilitasi pengalaman langsung (*hands-on experience*) dalam melakukan registrasi melalui portal DJP memberikan dimensi vokasional yang konkret, sekaligus meluruhkan kesan bahwa berurusan dengan birokrasi pemerintahan adalah hal yang kaku dan menyulitkan.

Penggunaan peranti telekomunikasi mandiri (*smartphone*) dalam tahapan simulasi ini juga memiliki landasan argumentasi psikologis yang kuat. Mengomparasikan PKM ini dengan kegiatan penyuluhan perpajakan serumpun yang diselenggarakan oleh Susanti dan Kurniawan (2023) yang memusatkan pelatihannya di dalam laboratorium komputer statis, pendekatan *Bring Your Own Device* (BYOD) yang diterapkan di Bekasi Selatan menghadirkan tingkat kenyamanan psikologis yang jauh lebih tinggi. Peserta menyadari secara riil bahwa ekosistem layanan administrasi negara kini telah bertransformasi ke dalam genggaman dan dapat mereka akses dari mana saja tanpa tuntutan kehadiran fisik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Secara lebih filosofis, upaya masif penanaman kesadaran taat pajak ini tidak dapat dipisahkan dari spektrum yang lebih makro dalam membangun literasi keuangan dan akuntansi yang beretika di kalangan generasi penerus bangsa. Menumbuhkan literasi kewajiban perpajakan memiliki kesamaan benang merah dengan konsep keadilan distribusi kekayaan, suatu topik esensial yang intens dibicarakan dalam ragam literatur akuntansi bisnis dan keuangan berbasis etika kesejahteraan. Pemahaman krusial bahwa instrumen pajak semata-mata difungsikan untuk kemaslahatan publik—melalui pemerataan infrastruktur dan jaring pengaman sosial—secara substansial menggemakan prinsip-prinsip filantropi sosial yang luhur guna menggerus ketimpangan struktural di tengah masyarakat.

Argumentasi di atas berjalan linear dengan temuan berbagai PKM yang memfokuskan kegiatannya pada peningkatan literasi akuntansi dan model bisnis inklusif, di mana tingkat penerimaan dan kepatuhan finansial peserta meningkat drastis ketika mereka mampu mengidentifikasi secara terang fungsi moral dari dana yang mereka distribusikan (Hasanah & Rahman, 2025). Dengan mengomparasikan kedua spektrum pemberdayaan tersebut, terlihat jelas bahwa metode edukasi yang sanggup mengolaborasikan rasionalitas administrasi ekonomi dengan nilai tanggung jawab kepedulian sosial kenegaraan akan berpotensi melahirkan kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan yang lahir dari kesadaran nurani ini memiliki daya tahan yang jauh melebihi kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*) oleh sanksi hukum semata.

Merujuk secara empiris pada tabulasi hasil kuesioner umpan balik yang terangkum dalam Tabel 4, tingkat kepuasan yang menyentuh persentase di atas 90% pada indikator relevansi masa depan mengukuhkan bahwa desain kegiatan PKM ini sangat adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Para peserta pemilih pemula secara eksplisit menuturkan bahwa simulasi yang dijalani sanggup menghapus fobia mereka terhadap kerumitan pengisian *form* legal negara. Umpan balik partisipatif ini menjelma menjadi justifikasi yang kokoh bahwa paradigma pengabdian berorientasi pada intervensi *soft skill* administratif digital jauh lebih disambut hangat oleh komunitas dibandingkan dengan model penyuluhan konvensional.

Keterlibatan proaktif dari entitas pendidikan tinggi dalam meruntuhkan dinding hambatan informasi antara otoritas fiskal dan masyarakat lapis akar rumput ini mempertegas kembali perwujudan sejati dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Insan akademisi dituntut untuk tidak sebatas memproduksi kajian teoretis, namun wajib memiliki kecakapan untuk menerjemahkan kompleksitas kebijakan publik ke dalam bahasa operasional yang membumi dan aplikatif (Setiawan & Larasati, 2024). Penyelenggaraan PKM di Bekasi Selatan ini menjadi representasi ideal mengenai bagaimana ilmu terapan di bidang ekonomi dan perpajakan diutilisasi secara riil untuk mengawal dan merespons transisi regulasi di tengah peradaban masyarakat modern.

Meskipun sukses menorehkan deretan *output* capaian yang terukur secara statistik, pelaksanaan PKM lapangan ini tentu tidak imun dari kemunculan kendala teknis. Argumentasi yang objektif perlu dikemukakan bahwa model pelatihan yang bersandar mutlak pada ekosistem teknologi digital selalu menyimpan kerentanan dari sisi konektivitas. Selama berlangsungnya sesi simulasi, tercatat adanya fluktuasi stabilitas akses akibat penumpukan lebar pita jaringan (*bandwidth*

bottleneck) tatkala puluhan perangkat mencoba melakukan sinkronisasi data ke server *ereg.pajak.go.id* pada detik yang berdekatan. Gejala ini berimbas pada memanjangnya durasi proses pemuatan halaman situs web (*loading timeout*) pada gawai sebagian peserta.

Menyikapi tantangan infrastruktur tersebut, tim pengabdian dengan sigap mengimplementasikan strategi rekayasa lalu lintas jaringan dengan membagi alur pengaksesan simulasi peserta ke dalam tiga gelombang jeda (Hidayatullah et al., 2024). Komparasi kendala ini dengan evaluasi program PKM berbasis digital di area lain menegaskan bahwa penyusunan peta jalan manajemen risiko Teknologi Informasi (TI) harus senantiasa diintegrasikan dalam penyusunan proposal pengabdian ke depan. Menariknya, proses penanganan hambatan internet tersebut secara tidak sengaja justru memberikan edukasi tambahan kepada para pemilih pemula tentang ketangguhan mental teknis (*technical resilience*) saat mengakses infrastruktur *e-government* dengan beban interaksi tinggi.

Secara komprehensif, penjabaran hasil intervensi dan diskusi mendalam dari perhelatan PKM ini mengonstruksi sebuah kesimpulan argumentatif bahwa pemilih pemula adalah modal sumber daya perpajakan paling prospektif yang wajib dirawat literasinya sejak dini. Transformasi regulasi konversi NIK menjadi NPWP seyogianya tidak dimaknai sebagai beban kewarganegaraan, melainkan lonjakan strategis dalam mewujudkan efisiensi administrasi *single identity number*. Dengan membekali mereka gabungan literasi konseptual fungsi pajak dan kecekatan pendaftaran *online*, PKM ini telah menyumbangkan sebuah fondasi intelektual untuk memastikan hadirnya generasi muda Bekasi yang sadar hukum, cakap digital, dan siap berkontribusi menopang kemandirian fiskal Republik Indonesia di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kecamatan Bekasi Selatan telah memberikan implikasi positif yang signifikan terhadap peningkatan literasi dan kesadaran perpajakan di kalangan pemilih pemula. Secara konseptual, kegiatan ini berhasil mendekonstruksi stigma negatif serta miskonsepsi peserta yang sebelumnya memandang pajak semata-mata sebagai ancaman atau beban finansial. Implikasi nyata dari intervensi edukasi ini adalah tumbuhnya pemahaman kritis bahwa pajak merupakan instrumen gotong royong warga negara dan pilar fundamental dalam menopang stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjelasan mendalam mengenai batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga terbukti efektif dalam meredakan kecemasan generasi muda terkait kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP, sehingga melahirkan sikap adaptif alih-alih resistensi terhadap regulasi fiskal pemerintah.

Dari aspek keterampilan teknis, terselenggaranya simulasi pendaftaran NPWP secara daring telah membawa implikasi langsung terhadap peningkatan kecakapan administratif digital para peserta. Pendampingan *step-by-step* dalam mengakses dan mengoperasikan portal e-Registration Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mentransformasi pengetahuan teoretis menjadi kemampuan vokasional yang konkret. Implikasinya, kelompok pemilih pemula kini memiliki kemandirian, kepercayaan diri, dan kesiapan administratif untuk mematuhi sistem perpajakan nasional segera setelah mereka memasuki dunia kerja dan memiliki penghasilan tetap. Ketercapaian ini menegaskan bahwa pendekatan pendampingan berbasis *hands-on experience* merupakan metode yang sangat esensial untuk menjembatani kesenjangan antara kompleksitas birokrasi pemerintah dan kepatuhan administratif generasi muda di tingkat tapak.

Berdasarkan implikasi keberhasilan tersebut, disarankan kepada pemangku kepentingan lokal, khususnya aparaturnya wilayah dan pengurus Karang Taruna di Kecamatan Bekasi Selatan, untuk mengadopsi program literasi kewarganegaraan ini sebagai agenda pembinaan rutin tahunan. Kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), disarankan agar sinergi partisipatif dengan institusi perguruan tinggi terus diperluas dan didukung dengan penyediaan *platform* simulasi edukasi (*dummy server*) yang lebih interaktif dan ramah pengguna bagi Generasi Z. Implikasi dari keberlanjutan sinergi lintas sektoral ini sangat krusial untuk memastikan bahwa edukasi fiskal tidak hanya berhenti sebagai program insidental, melainkan melembaga menjadi gerakan sadar pajak yang berkesinambungan di tengah masyarakat urban.

Bagi para akademisi dan pelaksana pengabdian di masa mendatang, implikasi dari tingginya antusiasme peserta dalam PKM ini membuka ruang eskalasi untuk mengembangkan modul literasi keuangan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Direkomendasikan agar kegiatan PKM selanjutnya dapat memperluas cakupan materi, tidak hanya berfokus pada administrasi perpajakan konvensional, tetapi juga mengeksplorasi irisannya dengan instrumen filantropi Islam dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan. Pendekatan edukasi yang mengintegrasikan nilai-nilai kepatuhan pajak negara dengan prinsip dasar akuntansi dan keuangan Islam diyakini akan memberikan implikasi sosiologis yang jauh lebih mendalam, sehingga mampu membentuk generasi muda yang rasional secara finansial sekaligus memiliki landasan moral yang kuat dalam berkontribusi bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi. (2025). *Kota Bekasi dalam Angka 2025*. BPS Kota Bekasi.
- Cahyani, A., & Wijaya, R. (2023). Efektivitas media pembelajaran digital terhadap literasi pajak generasi Z. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi*, 11(2), 145-158.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Panduan Penggunaan Aplikasi e-Registration Wajib Pajak Orang Pribadi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ermadiani, E., Susanti, S., & Pramono, H. (2023). Pemahaman generasi milenial terhadap fungsi pajak dan dampaknya pada kepatuhan. *Journal of Accounting and Auditing*, 9(1), 55-67.
- Hasanah, N., & Rahman, A. (2025). Integrasi kesadaran pajak dan nilai-nilai akuntansi beretika dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Journal of Islamic Philanthropy and Finance*, 4(1), 22-38.
- Hidayat, R., & Mulyana, D. (2024). *Community-Based Participatory Research dalam Pengabdian Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Akademika.
- Hidayatullah, M., Pratama, D., & Anisa, N. (2024). Manajemen risiko infrastruktur IT pada pelaksanaan pelatihan e-government di wilayah urban. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Manajemen*, 8(2), 112-125.
- Indriastuti, M., & Permatasari, D. (2022). Perilaku reaktif generasi Z terhadap kebijakan publik di media sosial. *Jurnal Sosiologi Digital*, 5(3), 89-102.
- Lestari, S., Widiastuti, E., & Gunawan, B. (2023). Pengujian asumsi normalitas pada riset sosial ekonomi menggunakan SPSS. *Jurnal Metodologi Kuantitatif*, 7(1), 34-45.
- Nugroho, A., Saputra, B., & Handayani, T. (2024). Edukasi Undang-Undang HPP dan peningkatan tax awareness pada mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 44-53.
- Pebriansyah, A., Kusuma, R., & Wardhani, S. (2024). Tantangan kepatuhan wajib pajak sukarela di era pascapandemi: Perspektif sosio-ekonomi. *Journal of Accounting and Auditing*, 10(2), 115-130.
- Pratama, Y., & Fitriani, L. (2023). Gaya kognitif pemilih pemula dan aksesibilitas ruang edukasi hukum. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(4), 210-225.
- Pundissing, R., Malik, A., & Setiawan, I. (2023). Analisis miskonsepsi integrasi NIK menjadi NPWP di kalangan masyarakat awam. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(2), 77-89.
- Rahmawati, S., Fauzi, A., & Lestari, D. (2024). Teknik sampling purposive dalam riset intervensi komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 50-62.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 12). Salemba Empat.
- Setiawan, B., & Larasati, I. (2024). Peran perguruan tinggi dalam menjembatani literasi fiskal di tingkat akar rumput. *Journal of Business and Islamic Accounting*, 7(2), 90-105.
- Sholahuddin, M., Anwar, K., & Rahmawati, E. (2022). Karakteristik sosiologis dan preferensi politik pemilih pemula di kawasan aglomerasi. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 14(1), 12-28.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Terbaru). Alfabeta.

- Suripto, T., Maulana, I., & Hasanuddin. (2024). Strategi pemulihan ekonomi makro dan optimalisasi penerimaan pajak domestik. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Nasional*, 11(3), 201-215.
- Susanti, E., & Kurniawan, B. (2023). Evaluasi efektivitas laboratorium komputer statis dalam penyuluhan perpajakan digital. *Jurnal Edukasi Teknologi*, 6(2), 65-78.
- Susilo, A. (2025). Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk resolusi misinformasi publik. *Jurnal Pengabdian Akademisi*, 5(1), 1-15.
- Wibowo, A., & Siregar, M. (2024). *Desain dan Evaluasi Program Pelatihan Berbasis Modul Interaktif*. Graha Ilmu.